

## **BAB IV**

### **FAKTOR YANG MEMPERNGARUHI JEPANG MEMPERTAHANKAN PANGKALAN MILITER AS DI OKINAWA**

Bab ini akan menjelaskan mengenai *self preservation* yang dilakukan Jepang demi melindungi diri dari Korea Utara dan China dan keterbatasan militer Jepang. Jepang merupakan Negara yang besar secara ekonominya namun secara militernya Jepang masih harus bergantung kepada Amerika, dikarenakan sejarah Jepang yang harus menyetujui adanya pangkalan militer AS di tanah Jepang sebagai konsekuensi kekalahan Jepang paska Perang Dunia II.

#### **A. *Self Preservation* Jepang terhadap China**

Negara China merupakan Negara yang tidak bisa dianggap remeh oleh Jepang terutama oleh Amerika Serikat. China dengan cepat dan luas telah memperkuat kekuatan militernya. China memperluas dan mengintensifkan kegiatannya di laut dan di wilayah udara, termasuk Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Jepang memiliki keprihatinan besar atas kegiatan militer China yang semakin kuat tersebut. Bersamaan dengan kurangnya transparansi dalam urusan militer dan keamanannya, dan perlu memberi perhatian penuh kepada China. Berkembangnya kekuatan militer China menimbulkan masalah keamanan bagi kawasan dan masyarakat internasional. China belum memberikan informasi spesifik tentang kepemilikan senjata, tujuan pengadaan, organisasi dan lokasi unit-unit utama, catatan operasi dan latihan militer utama, dan rincian tentang anggaran pertahanan nasional. Sikap China yang tidak transparansi terhadap angkatan militer yang dia punya menyebabkan Amerika Serikat dan Jepang semakin khawatir dengan apa yang bisa China lakukan. Anggaran pertahanan nasional China yang terus meningkat dengan pesat, hampir konsisten dari

1989 sampai sekarang. Ukuran nominal anggaran pertahanan nasional China diumumkan telah tumbuh sekitar 41 kali lipat dalam 27 tahun sejak 1988 dan hampir 3.6 kali lipat dalam 10 tahun sejak 2005. Beberapa analis menunjukkan bahwa China juga dapat membangun kapal induk domestik pertamanya. Selain itu, China sedang mengembangkan J-20 dan J-31. China dianggap telah membentuk "Komando Operasi Gabungan Laut Cina Timur" untuk mengoperasikan Angkatan Laut dan Angkatan Udara bersama. Sebagai tambahan, beberapa analis telah menyatakan bahwa PKC membentuk "Pusat Komando Operasi Komando Militer Pusat Militer" untuk melakukan pengambilan keputusan pada tingkat strategis tertinggi. Selanjutnya, China baru saja melakukan latihan yang ditujukan untuk pengembangan postur operasional gabungan.

Kementerian Pertahanan Jepang menanggapi kekhawatiran yang berkembang mengenai kebijakan luar negeri China yang semakin tegas dengan mengadvokasi penciptaan kekuatan darat Jepang yang diadakan setelah militer AS memperkuat pertahanan pulau-pulau kecil di barat daya Jepang." Kementerian tersebut merekomendasikan untuk menggandakan 2.000 tentara GSDF di Okinawa dan mengembangkan kekuatan darat yang mampu melakukan operasi amfibi untuk merebut kembali pulau-pulau yang dipegang oleh kekuatan musuh.

Pada tahun 2013-2014 China diyakini bertujuan untuk membangun kemampuannya melakukan operasi di perairan dan wilayah udara. Dengan demikian, China telah dengan cepat memperluas kegiatan maritimnya berdasarkan kekuatan laut dan tenaga udara, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Tindakan China ini merupakan tindakan berbahaya yang dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Seperti bila terjadi kecelakaan pesawat yang nanti bisa terjatuh dan mengenai pemukiman masyarakat. Pemerintah China mengumumkan bahwa mereka mendirikan "ADIZ China Timur Laut" termasuk Kepulauan Senkaku yang bagi China merupakan bagian dari wilayah China yang mana itu merupakan pulau yang berada di

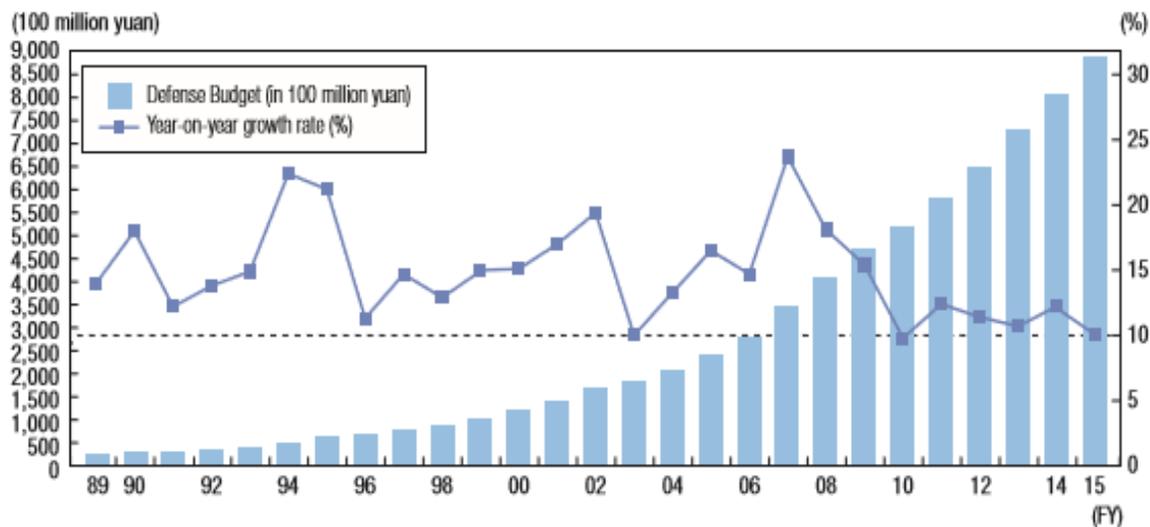
Jepang dan sudah menjadi milik Jepang. Angkatan Bersenjata China akan melakukan "tindakan darurat defensif" bila diperlukan mengenai pulau Senkaku. Dimana pesawat terbang tidak mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan Nasional China. Langkah-langkah ini terlalu melanggar kebebasan overflight atas laut lepas, yang merupakan prinsip umum hukum internasional. Jepang menuntut China untuk mencabut semua tindakan yang bertentangan dengan prinsip kebebasan overflight atas laut lepas.

Jumlah kapal permukaan laut China yang melaju ke Samudera Pasifik telah meningkat dalam jangka waktu 2013-2015 yang mana dilakukan secara rutin oleh Jepang. Berkenaan dengan kegiatan kapal pemerintah China, sejak Oktober 2013, operasi kapal pemerintah yang menyusup ke perairan teritorial di dekat Kepulauan Senkaku mulai menjadi rutin. Dalam hal ini, operasi manual atau kode lainnya mungkin telah dikembangkan. Selanjutnya, China telah berusaha untuk mengembangkan kapal-kapal pemerintah yang lebih besar dan melanjutkan pembangunan kapal patroli kelas 10.000 ton kelas dunia.

Salah satu tujuan kegiatan maritim China adalah melemahkan kontrol negara-negara lain di atas pulau-pulau yang China klaim kedaulatan teritorialnya, sambil memperkuat klaim kedaulatan teritorialnya, melalui berbagai kegiatan pengawasan dan penggunaan kekuatan di laut dan di wilayah udara yang mengelilingi pulau-pulau. Pada bulan April 2014 China bersama dengan negara lain seperti Jepang dan Amerika Serikat, menyetujui Kode untuk Pertemuan yang Tidak Terencana di Laut (CUES). Selain itu, pada bulan Januari 2015, otoritas pertahanan Jepang dan China melanjutkan konsultasi untuk segera memulai pelaksanaan Mekanisme Komunikasi Maritim dan Udara.

China mengumumkan bahwa anggaran pertahanan nasional 2015 sekitar 886,9 miliar yuan. Namun, jumlah ini tidak termasuk beberapa biaya yang dimasukkan melalui tahun sebelumnya,

seperti biaya yang berkaitan dengan relokasi ke daerah. Dengan Penambahan mereka total menjadi sekitar 889,6 miliar yuan. Jumlah anggaran awal ini menunjukkan pertumbuhan sekitar 10,1% dibandingkan dengan jumlah anggaran awal untuk tahun 2014. Anggaran pertahanan nasional yang diumumkan China terus meningkat dengan pesat, mencatat pertumbuhan tahunan dua digit hampir konsisten dari tahun 1989 sampai sekarang.<sup>1</sup> China memposisikan kemampuan pertahanan sebagai tugas penting sebagai pembangunan ekonomi. Dipercaya bahwa China terus menginvestasikan sumber daya dalam meningkatkan kemampuan pertahanannya. Untuk memberi gambaran perkembangan anggaran budget militer China berikut gambar anggarannya.



Gambar 4. 1 perkembangan Budget militer China tahun 1989-2015

Source: [http://www.mod.go.jp/e/publ/w\\_paper/2015.html](http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2015.html) "Defense of Japan 2015" section

China. Hlm 37

Walaupun mulai dari 2008-2015 anggaran militer Jepang mempunyai penurunan tetapi anggaran militer China tetap berada diatas anggaran militer Jepang. Lalu dicurigai bahwa budget anggaran yang di publikasikan China adalah tidak anggaran secara keseluruhan. Jepang dan China

<sup>1</sup> [http://www.mod.go.jp/e/publ/w\\_paper/2015.html](http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2015.html) "Defense of Japan 2015" section China.

mempunyai sengketa perebutan pulau Senkaku, demi menjaga teritori Jepang maka Jepang dan AS harus tetap beraliansi untuk mempertahankan geografis dan teritori Jepang.

### **B. *Self Preservation* Jepang terhadap Korea Utara**

Jepang dan Korea Utara sama-sama berada di Asia Timur. Hubungan antara Jepang dan Korea Utara sudah memiliki masalah sejak tahun 1500an, diawali dengan keinginan dari Jepang untuk memperluas wilayahnya di kawasan Korea. Kependudukan Jepang di semenanjung Korea ini berlangsung hingga tahun 1945. Awal Keberadaan Jepang di Semenanjung Korea pada tahun 1500. Saat itu semenanjung Korea menjadi daerah yang diperebutkan oleh China dan Jepang. Hal ini diakibatkan oleh kekalahan Jepang pada Perang Dunia ke II. Diawal kemerdekaan semenanjung Korea banyak pihak yang mencampuri kemerdekaan tersebut sehingga mengakibatkan buruknya situasi di Semenanjung Korea pada masa itu. Hingga terjadilah Perang Korea, akibatnya Semenanjung Korea terbagi menjadi dua bagian yakni *Republic Of Korea* atau biasa dikenal juga sebagai Korea selatan dan bagian lainnya adalah *Democratic People's Republic Of Korea* atau biasa dikenal sebagai Korea Utara. Invansi yang pernah dilakukan oleh Jepang kepada Korea ini memberi mimpi buruk yang susah di lupakan. Akibatnya hubungan Jepang dan Korea tidak mudah untuk di normalisasikan.

Tahun 1965 Hubungan diplomatik Jepang dan Korea Selatan sudah di normalisasi. Berbeda dengan Korea selatan, Jepang belum mempunyai hubungan diplomatic secara resmi dengan Korea Utara. Korea Utara sendiri merupakan Negara yang tertutup dengan Negara Negara lain. Korea utara hanya mempunyai beberapa hubungan diplomatik kepada Negara non komunis. Belum adanya hubungan diplomatik kedua Negara ini dikarenakan karena Jepang tidak mengakui kedaulatan Korea Utara. Pada saat terjadinya Perang Korea Jepang dan Amerika berada di pihak

Korea Selatan dan membantu Korea Selatan untuk mencapai kedaulatannya. Hal ini dilakukan oleh Jepang dan Amerika karena tidak menginginkan adanya Negara Komunis di dalam dunia ini. Pada saat itu Uni Soviet mencoba menyebarkan bendungan komunisnya di semenanjung Korea melalui Korea Utara sehingga Amerika merasa harus bercampur tangan di Perang Korea yaitu dengan membantu Korea Selatan dalam perang Korea.

Korea Utara adalah Negara satu satunya yang tidak mempunyai hubungan diplomatik secara resmi dengan Jepang. Hubungan Jepang dan Korea Utara sendiri mengalami pasang surut. Pada awal tahun 1950an terjadi hubungan antara kedua Negara tersebut walaupun bukan hubungan yang resmi namun hubungan tersebut merupakan kemajuan bagi kedua Negara ini. Adanya hubungan perdagangan Jepang dan Korea Utara yang dilakukan oleh Warga Negara Korea Utara yang menetap di Jepang. Perdagangan yang dilakukan terhadap pembisnis tersebut meningkat pada tahun 1957 yang mencapai US\$ 6juta dan puncaknya berada pada tahun 1964 yang mencapai US\$ 30 juta. Namun pada tahun 1965 saat Jepang menormalisasi hubungan diplomatik dengan Korea Selatan, angka tersebut turun jauh menjadi US\$ 7juta pada tahun 1966.

Dengan adanya normalisasi hubungan diplomatik Jepang dan Korea Selatan, bagi Korea Utara itu menandakan Jepang mengakui dua kekuasaan Korea di Semenanjung Korea. Hal ini bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Korea Utara yaitu ingin untuk diadakannya reunifikasi bahwa ghanya ada satu Korea yang ada di bawa kekuasaan Korea Utara. Tahun 1955 pemerintah Korea Utara mengeluarkan pernyataan yang berhubungan dengan kemungkinan untuk dimulainya hubungan kedua Negara secara resmi.

Hal yang membuat Jepang ingin untuk mengembangkan kerjasamanya dengan Korea Utara tidak lain adalah karena Jepang waspada dengan kekuatan nuklir yang dipunya oleh Korea Utara, permasalahan kapal mata mata yang dipunyai Korea Utara melintas di territorial Jepang dan Di

culiknya warga Negara Jepang oleh Agen Rahasia dari Korea Utara. Tahun 1985 Korea Utara dianggap mempunyai program Nuklir yang berbahaya dan secara rahasia. Namun Korea Utara tidak mengakui bahwa sedang mempunyai Nuklir secara rahasia. Dunia kembali curiga ketika pada tahun 1993 Korea Utara menolak kedatangan tim inspeksi dari *IAEA (International Atomic Energy Agency)* dan malah mengundurkan diri dari *NPT (Treaty On The Non Prolifiration Of Nuclear Weapons)*.

Tahun 1998 Korea Utara melakukan uji coba rudal tipe *No-Dong* yang berjarak tempuk 1300km dan tipe *Taepo-dong* dengan jarak tempuh 1500km. Lokasi dari Uji Coba ini melewati Jepang dan berada di laut pasifik. Pada tahun 2006 Korea Utara kembali melakukan pengujian Rudal tetap di laut pasifik namun kali ini berada lebih dekat dengan Jepang. Korea Utara malah mengembangkan rudal *No-Dong* dan *Taepo-dong* yang mempunyai Jarak tempuh 3.500km-6000km. Kekuatan rudal ini menjadi hal yang mengintimidasi Jepang dan mengkhawatirkan karna rudal membawa kimia berbahaya yang nantinya dapat mengancam daerah industri dan pemukiman penduduk di Jepang. Jepang juga mencemaskan keakuratan percobaan rudal tersebut mengingat bahwa pada tahun itu Korea Utara belum mempunyai teknologi yang belum canggih sehingga ada kemungkinan untuk membahayakan Jepang. Tahun 2006 tepatnya tanggal 6 juli Korea Utara kembali melakukan percobaan rudal yakni meluncurkan 7 rudalnya. 1 rudal di luncurkan di perairan dekat dengan Korea Utara dan 6 lainnya mendarat di dekat perairan Jepang. Percobaan rudal yang dilakukan oleh Korea Utara ini tidak memberi peringatan sebelumnya untuk Negara Jepang. Hal ini dilakukan oleh Korea Utara untuk menunjukkan bahwa Korea Utara mempunyai kekuatan untuk menyerang Jepang.

Korea Utara mempunyai alasan alasannya mengapa mempunyai Nuklir. Bagi Korea Utara mempunyai Nuklir berarti bahwa akan menyandang Wibawa dan harga diri yang besar di kancan

Internasional serta dengan adanya nuklir itu berarti bahwa Korea Utara memiliki sarana untuk melakukan *Blackmail*. Korea Utara juga berpendapat bahwa mempunyai nuklir adalah hak segala Negara yang berdaulat untuk mempertahankan kebebasan Bangsa, keamanan Negara dan untuk mencegah kemungkinan perang yang akan terjadi. Karena pandangan Korea Utara tersebut menyebabkan Korea Utara tidak patuh akan ketentuan Internasional.

Penolakan tim inspeksi IAEA kembali dilakukan oleh Korea Utara pada 31 Desember 2002 dan juga keluar dari NPT pada 9 Januari 2003. Dengan segala militer yang dipunyai oleh Negara Korea Utara mengharuskan Jepang untuk mempunyai perlindungan militer untuk perdamaian Negara Jepang dan keberlangsungan hidup Negara Jepang. Pembangunan nuklir dan rudal Korea Utara yang terus berlanjut, yang jelas-jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, menimbulkan ancaman langsung dan serius terhadap keamanan Jepang, dan secara signifikan mengancam perdamaian dan keamanan Asia Timur Laut dan masyarakat internasional.

Pangkalan militer AS di Okinawa memainkan peran penting dalam Rencana Operasi 5027, yaitu rencana perang gabungan AS - Korea Selatan untuk menanggapi invasi Korea Utara. Pasukan laut AS mampu melakukan berbagai operasi tempur di Korea. Bahkan ancaman yang diberikan dari invasi amfibi akan memaksa Korea Utara untuk mengalihkan pasukan daratnya. Mantan komandan Pasukan AS Jenderal Burwell Bell, mengatakan bahwa pangkalan militer AS di Okinawa memiliki peran penting dalam kontingensi Korea manapun. Tanpa pangkalan militer AS ,tidak menutup kemungkinan akan menjadi Perang Dunia I lagi.

Perwakilan Park Jin, yang merupakan kepala pimpinan dari the *Foreign Affairs Committee of the South Korean National Assembly* tahun 2010 pada saat pertemuan the *4<sup>th</sup> Seoul-Washington Forum* yang diadakan di Institusi Brookings Washington D.C pada Mei 2010 menyatakan bahwa Pangkalan militer AS yang terletak di Okinawa mempunyai peran penting dalam menjaga

semenanjung Korea secara damai dan aman. Marinir AS di Okinawa berkewajiban untuk menjaga Korea Selatan. Dengan demikian, dengan adanya relokasi pangkalan militer AS di Jepang tidak hanya mempengaruhi hubungan AS-Jepang tapi juga keamanan di semenanjung Korea.<sup>2</sup>

Ketua Komisi pertama Pertahanan Nasional, Kim Jong-un, yang mempunyai hak untuk mengendalikan militer, mencatat pentingnya kekuatan militer dalam *New Year Address*-nya pada bulan Januari 2015: "*We were just in our efforts to firmly consolidate our self-reliant defense capability with the nuclear deterrent as its backbone and safeguard our national sovereignty, the lifeblood of the country, under the unfurled banner of Songun (military-first)*"<sup>3</sup> yang berarti bahwa Korea Utara hanya mencoba usaha untuk mengkolidasikan kemampuan pertahanan diri Korea diri dengan alat pencegah nuklir sebagai tulang punggung pertahanan dan melindungi kedaulatan nasional kita, sumber kehidupan negara, di bawah bendera Songun (militer-terlebih dahulu) yang dibentangkan. Selain itu, Ki Jong-un secara teratur mengunjungi organisasi militer yang berada di Korea Utara. Dilihat dari sikap tersebut bisa dikatakan bahwa Korea Utara akan terus mementingkan dan mengandalkan kekuatan militer yang mereka punya.

Korea Utara telah menghadapi kesulitan ekonomi yang serius dan bergantung pada masyarakat internasional untuk makanan dan sumber daya lainnya, namun tampaknya hal itu bukan menjadi penghalang Korea Utara untuk tetap menjaga, meningkatkan kemampuan militernya dan menjaga kesiapan tempur dengan mengalokasikan sumber daya secara khusus untuk kekuatan militernya.

---

<sup>2</sup> Hon. Park Jin, Chairman of the Foreign Affairs, Trade and Unification Committee, National Assembly, Republic of Korea, Keynote Speech, The 4th Seoul–Washington Forum, May 3, 2010, Brookings Institution, Washington, D.C.

<sup>3</sup> [http://www.mod.go.jp/e/publ/w\\_paper/2015.html](http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2015.html) "Defense of Japan 2015"

Korea Utara sering menggunakan kata-kata dan tindakan provokatif untuk melawan negara-negara yang relevan, termasuk Jepang. Secara khusus, dari bulan Maret-April 2013, Korea Utara menggaris bawahi bahwa akan menggunakan haknya untuk melakukan pencegahan serangan nuklir terhadap AS dan negara-negara lain, dan bahwa zona penyerangan rudal balistiknya meliputi Jepang.. Pada bulan November 2014,

Nuklir Korea Utara memang tidak bisa ditolerir. Hal ini menyebabkan perhatian yang cukup harus diberikan pada pengembangan dan pengerahan rudal balistik, konfrontasi militer di Semenanjung Korea, perkembangbiakan WMD dan rudal balistik oleh Korea Utara. Korea Utara terus mempertahankan rezimnya yang sangat tertutup, yang kemudian menjadi sulit untuk mengetahui secara akurat rincian dan perilaku Korea Utara di kacamata Internasional.

		North Korea
Total armed forces		Approx. 1.19 million personnel
Army	Ground troops	Approx. 1.02 million personnel
	Tanks	T-62, T-54/-55, etc. Approx. 3,500
Navy	Naval vessels	Approx. 780; 103,000 tons
	Destroyers	3
	Frigates	
	Submarines	20
	Marines	
Air Force	Combat aircraft	Approx. 560
	3rd and 4th generation fighter aircraft	Mig-23 x 56 Mig-29 x 18 Su-25 x 34
Reference	Population	Approx. 24.7 million
	Term of service	Army: 5–12 years Navy: 5–10 years Air Force: 3–4 years

Table 4. 1 Kekuatan militer Korea Utara 2015

Sumber: [http://www.mod.go.jp/e/publ/w\\_paper/2015.html](http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2015.html) “Defense of Japan 2015” Chapter “Korean Peninsula”

Situasi Umum yang ada di Korea Utara telah membangun kemampuan militernya sesuai dengan Empat Panduan Militer yaitu pelatihan ekstensif untuk semua tentara, memodernisasi semua kekuatan militer, mempersenjatai seluruh populasi, dan memperkuat seluruh wilayah yang ada di negara.<sup>4</sup> Ke empat panduan militer ini di adopsi dari rapat pleno ke empat yang diadakan oleh *Korean Workers' Party's*.

---

<sup>4</sup> Ibid Hlm 17

Pasukan militer Korea Utara sebagian besar terdiri dari pasukan darat, dengan kekuatan pasukan total sekitar 1,19 juta. Korea Utara memiliki kekuatan pasukan operasi khusus berskala besar yang dapat melakukan berbagai operasi mulai dari pengumpulan intelijen dan sabotase, hingga perang gerilya. Selain itu, Korea Utara disinyalir memiliki banyak instalasi militer bawah tanah di wilayahnya. Kemampuan Militer Tentara Korea Utara terdiri dari sekitar satu juta personil. Meskipun sumber daya terbatas, Korea Utara terus memperkuat kekuatan konvensional dan memperbaiki peralatannya, seperti tank tempur utama dan beberapa roket peluncur. Angkatan Laut memiliki sekitar 780 kapal dengan total sekitar 103.000 ton dan merupakan bagian dari kapal angkatan laut kecil seperti kapal rudal berkecepatan tinggi.

Sedangkan Angkatan Udara Korea utara memiliki sekitar 560 pesawat tempur, yang sebagian besar adalah model lama yang dibuat di China atau bekas Uni Soviet. Namun, beberapa pesawat generasi keempat seperti pesawat MiG-29 dan pesawat tempur Su-25 juga disertakan. Korea Utara memiliki sejumlah besar pesawat transport An-2, yang diyakini digunakan untuk transportasi pasukan operasi khusus. Korea Utara juga memiliki kemampuan militer asimetris yang disebut dengan pasukan operasi khusus yang ukurannya diperkirakan 100.000 personil. Korea Utara memiliki dua jenis pasukan operasi khusus: satu di bawah pasukan militer dan yang lainnya berada di bawah *Korean Workers' Party*. James Thurman, yang saat itu menjadi Komandan Pasukan AS di Korea mengatakan pada pidatonya di Asosiasi Angkatan Darat AS di bulan Oktober 2012 bahwa Korea Utara memiliki kekuatan operasi khusus terbesar di dunia dengan lebih dari 60.000 personil. Pasukan militer Korea Utara secara aktif melakukan berbagai jenis pelatihan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesiapan operasional mereka.

Dengan besarnya militer Korea Utara namun tertutupnya mereka akan militer yang mereka punya membuat Jepang harus selalu waspada akan kemungkinan yang dapat terjadi akibat militer

Korea Utara. Terlebih lagi Korea Utara yang mempunyai hubungan buruk dengan AS yang membuat Korea Utara memasukan Jepang kedalam daftar Negara yang dapat mereka serang. AS juga harus melindungi Jepang dikarenakan AS tidak ingin Negara Komunis menyebarkan ideologisnya.

### **C. Keterbatasan Militer Jepang.**

Jepang merupakan Negara yang tumbuh dan berkembang secara ekonomi. Jepang bisa di sandingkan dengan bangsa besar lainnya secara ekonominya. Namun di bidang militernya Jepang tidak sebesar perekonomiannya, militer Jepang masih dikatakan cukup besar dikarenakan ada campur tangan AS di belakangnya.

Sejak akhir Perang Dunia II, Jepang membuat keputusan untuk tidak mengulangi kerusakan akibat perang dan telah bekerja keras untuk membangun negara yang penuh cinta damai. Orang Jepang menginginkan perdamaian abadi, kemudian diabadikan dalam Konstitusi, yang mana Pasal 9 mengatur penolakan perang, kepemilikan potensi perang, dan hak untuk berperang oleh negara. Tentu saja, karena Jepang adalah negara merdeka, ketentuan ini tidak menyangkal hak pertahanan diri Jepang sebagai negara berdaulat.

Karena hak pembelaan diri tidak bisa dihilangkan. Pemerintah Jepang menafsirkan ini berarti bahwa Konstitusi mengizinkan Jepang memiliki tingkat minimum angkatan bersenjata yang dibutuhkan untuk menjalankan hak tersebut. Oleh karena itu, Jepang, di bawah Konstitusi, mempertahankan Pasukan Bela Diri (*Self-Defense Forces / SDF*) sebagai organisasi bersenjata, yang memegang kebijakan pertahanan yang secara eksklusif berorientasi pada bangsa sebagai strategi pertahanan dasarnya, dan terus membuatnya tetap siap beroperasi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> [http://www.mod.go.jp/e/publ/w\\_paper/2015.html](http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2015.html) "Japan's Security and Defense Policy and the Japan-U.S. Alliance Chapter 1 Basic Concepts of Japan's Security and Defense"

Kemampuan pertahanan adalah suatu jaminan keamanan tertinggi bangsa,. Untuk alasan ini, Jepang berusaha untuk mengembangkan kemampuan pertahanan yang tepat untuk melindungi kehidupan, warganya dan untuk mempertahankan wilayah teritorial, laut, dan wilayah udara Jepang. Dengan cara memperkuat aliansi Jepang-AS yang memiliki nilai dan kepentingan dasar dengan Jepang. Perdamaian dan keamanan Jepang melalui pengembangan langkah-langkah pertahanan yang baik dengan menggabungkan kemampuan pertahanan Jepang sendiri dengan pengaturan keamanan Japan-AS.

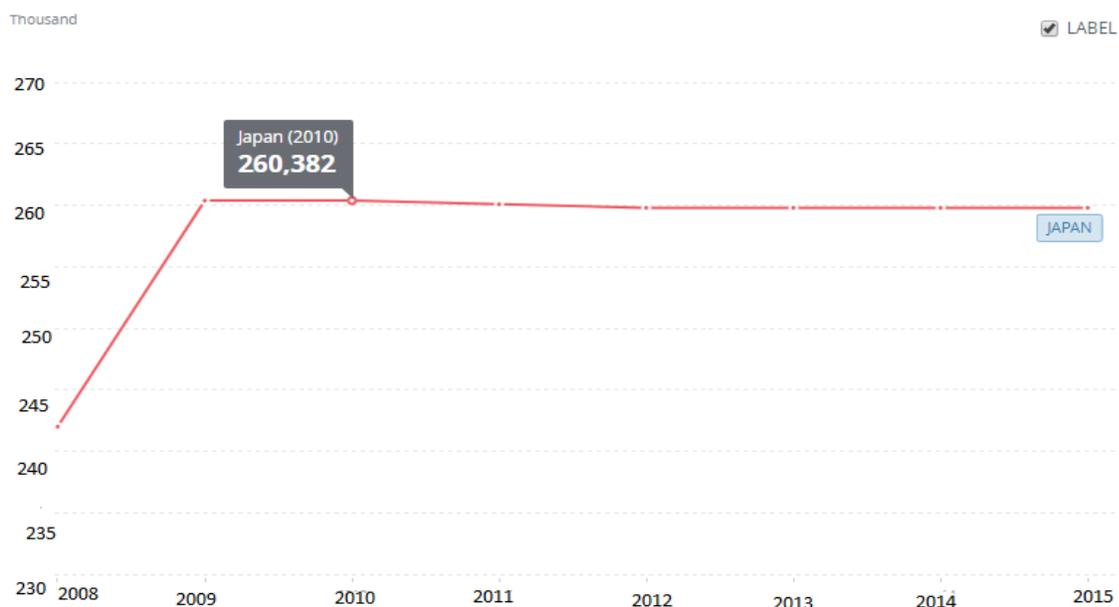
Untuk memperbaiki lingkungan keamanan di sekitar Jepang, Jepang mencegah munculnya ancaman ke dalam negeri. Berdasarkan Konstitusi, Jepang diizinkan untuk memiliki tingkat kemampuan pertahanan diri minimum yang diperlukan. Batas yang ditentukan secara spesifik dapat berubah sesuai dengan situasi internasional yang berlaku, tingkat teknologi militer, dan berbagai faktor lainnya, dan dibahas dan diputuskan melalui pertimbangan anggaran tahunan dan faktor lain oleh Diet atas nama rakyat.

Namun Jepang tetap melarang kepemilikan persenjataan yang dianggap sebagai senjata ofensif yang dirancang untuk digunakan hanya untuk pemusnah massal, yang menurut definisinya akan melebihi tingkat minimum yang diperlukan, tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun. Misalnya, SDF tidak diizinkan untuk memiliki rudal balistik antar benua (ICBM), pengebom strategis longrange, atau menyerang kapal induk.

Jepang mempunyai tiga prinsip non nuclear yaitu mengacu pada tidak memiliki senjata nuklir, tidak memproduksinya, dan tidak membiarkan nuklir dibawa ke Jepang. Jepang menganut prinsip ini sebagai garis tegas kebijakan nasional. Jepang juga dilarang memproduksi dan memiliki

senjata nuklir di bawah Undang-Undang Dasar Energi Atom.<sup>6</sup> Selain itu, Jepang meratifikasi Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT), dan sebagai negara senjata non-nuklir, berkewajiban untuk tidak memproduksi dan memperoleh senjata nuklir.

Pada tahun 2010 jumlah personil angkatan militer Jepang berada di angka 260,382 ribu jiwa, dan turun menjadi 260,086 ribu jiwa pada tahun 2011. 1 kemudian ditahun 2012 turun kembali menjadi 259.800 ribu jiwa, hingga tahun 2015 jumlah personil militer Okinawa mencapai di angka yang tetap pada 259.800 jiwa. Berikut grafik jumlah personil militer Jepang pada tahun 2007 hingga 2015



**Table 4. 2 Grafik personil militer Japan 2007-2015**

Duta Besar AS untuk Jepang John Roos telah menjelaskan melalui pidatonya “*The Enduring Importance of Our Security Alliance*”, Di Waseda University bahwa peran fundamental pasukan militer AS di Jepang adalah “*make those who would consider the use of force in this*

<sup>6</sup> Article 2 of the Atomic Energy Basic Law states that “The research, development and utilization of atomic energy shall be limited to peaceful purposes, aimed at ensuring safety and performed independently under democratic management.”

*region understand that option is off the table. The forward deployment of U.S. forces puts us in a position to react immediately to emerging threats*<sup>7</sup> yang berarti bahwa kehadiran pangkalan militer AS di Jepang akan membuat mereka (Negara Negara lain) yang akan mempertimbangkan penggunaan kekerasan di wilayah Jepang, untuk mengerti bahwa penggunaan kekerasan di wilayah Jepang tidak ada dalam pilihan penyelesaian masalah di Jepang. Penyebaran pasukan AS di Okinawa menempatkan militer AS pada posisi untuk bisa segera bereaksi terhadap ancaman yang muncul.<sup>8</sup>

*Japanese National Defense Program Guidelines* Desember 2010 mencatat bahwa kehadiran angkatan bersenjata AS di Jepang memberikan rasa aman terhadap negara-negara di wilayah Asia Pasifik.<sup>9</sup> Menteri Luar Negeri Okada menyampaikan kehadiran pangkalan militer AS di Okinawa diperlukan untuk keamanan nasional Jepang militer AS merupakan pencegah kemungkinan serangan musuh dan harus ditempatkan di Jepang.

Kehadiran pangkalan militer AS juga ada untuk membantu Amerika memenuhi komitmennya membela Jepang, termasuk Kepulauan Senkaku. Perdana Menteri Kanai pernah memberi pernyataan "Semua pasukan AS yang ditempatkan di Jepang termasuk marinir di Okinawa memainkan peran penting dalam memberikan kontribusi bagi keselamatan bangsa Jepang dan stabilitas wilayah".<sup>10</sup>

Jepang tidak memiliki kekuatan militernya sendiri, Jepang memiliki kekuatan dasar yang dibatasi dan kurang mampu dibandingkan dengan AS, serta memiliki kemampuan operasi

---

<sup>7</sup> [http://www.heritage.org/asia/report/top-10-reasons-why-the-us-marines-okinawa-are-essential-peace-and-security-the-pacific#\\_ftn7](http://www.heritage.org/asia/report/top-10-reasons-why-the-us-marines-okinawa-are-essential-peace-and-security-the-pacific#_ftn7)

<sup>8</sup> ibid

<sup>9</sup> [http://www.mod.go.jp/e/d\\_act/d\\_policy/pdf/guidelinesFY2011.pdf](http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/pdf/guidelinesFY2011.pdf) "National Defense Program Guidelines for FY 2011 and Beyond,"

<sup>10</sup> <http://www.asahi.com/english/TKY201102160285.html> "Hatoyama's Betrayal," *Asahi Shimbun*, February 17, 2011"

persenjataan yang buruk. Kehadiran pangkalan AS yang berlanjut memastikan bahwa keterbatasan keamanan Jepang tidak menjadi hambatan bagi Negara Jepang dalam melindungi negaranya dan kepentingan nasional Jepang.

AS menempati peringkat 1 di dunia di bidang militernya. Tahun 1947 di konstitusi Jepang, yang ditulis dan di bebaskan Angkatan Darat Amerika untuk Jepang mengizinkan militer AS, yang dikenal sebagai Pasukan Bela Diri (Self berteknologi maju dilarang "membela diri secara kolektif" - membantu negara-negara sahabat yang diserang. Konstitusi ini ada dikarenakan kekalahan Jepang paska Perang Dunia II yaitu Jepang memang tidak dibolehkan untuk mempunyai kekuatan militer sama sekali. Amerika pada saat itu takut bila militer Jepang tidak dibatasi lalu akan kembali mengancam kedamaian Dunia.

Pada tahun 2010 anggaran yang diberikan Jepang terhadap militernya ada diangka 4.798 triliun, 2011 mencapai angka 4.849, lalu tahun 2015 mencapai 4975 triliun. Berikut grafik anggaran militer Jepang dari tahun 2010-2015.

**Table 4. 3 Grafik anggaran militer Jepang 2010-2013**



Walaupun anggaran yang dimiliki Jepang yang semakin tahun semakin naik namun kenaikan yang Jepang punya tidak sebanding dengan kenaikan anggaran militer yang dipunyai oleh Korea Utara dan China. Hal ini yang menyebabkan Jepang masih di bayangi rasa takut akan serangan yang dapat terjadi dari kedua Negara tersebut.

Pasukan Bela Diri negara Jepang pada awalnya terbatas untuk menangkis serangan terhadap pulau-pulaunya. Lalu Jepang mulai melakukan perubahan setelah dituduh melakukan “*Diplomacy Check Book*”<sup>11</sup> selama perang Irak 1990-1991 untuk menyumbang \$13 miliar namun tidak ada pasukan. Berdasarkan perjanjian keamanan Jepang dan Amerika Serikat, dan pengaturan keamanan Jepang-Amerika Serikat, Militer AS merupakan landasan bagi keamanan Jepang. Aliansi Jepang-AS yang berpusat pada pengaturan keamanan bilateral berfungsi sebagai ranah publik yang berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran, tidak hanya di Jepang tapi juga di wilayah Asia-Pasifik dan dunia pada umumnya. Amerika Serikat mempertahankan dan

<sup>11</sup> <https://www.bloomberg.com/quicktake/japan-military> “Japan’s Military”

memperkuat keterlibatan dan kehadirannya di kawasan Asia Pasifik. Bagi Amerika, menjadi lebih penting dari sebelumnya untuk memperkuat aliansi Jepang-Amerika untuk keamanan Jepang.

Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951 yang ditandatangani antara Jepang dan Sekutu mengizinkan AS untuk melanjutkan pendudukan dan penguasaan Okinawa. Ini diikuti oleh permintaan lebih lanjut atas tanah rakyat dalam skala yang lebih besar, yang mana akan lebih banyak beban dan penderitaan pada rakyat Okinawa. Di Pulau Iejima, penyitaan tanah dimulai pada tahun 1953. Pasukan AS mendesak orang-orang di pulau itu untuk menyerahkan tanah mereka, mendorong mereka untuk bermigrasi ke Amerika Selatan atau mengancam mereka dengan mengirimkan perwira mereka ke rumah orang-orang.

Jepang mempunyai pedoman baru untuk keamanannya. Pada puncak pertemuan yang diadakan selama Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) pada November 2015, disepakati untuk membangun jaringan untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di kawasan ini, dengan Aliansi Jepang-A.S sebagai penopang. Pada April 2015 Komite Konsultatif Keamanan Jepang-Amerika Serikat diadakan, dan Pedoman baru untuk Kerjasama Pertahanan Jepang-Amerika Serikat (Pedoman Baru) diumumkan. Bersama dengan Perundang-undangan untuk Perdamaian dan Keamanan, Pedoman Baru ini lebih jauh meningkatkan kemampuan Aliansi Jepang-AS, sehingga memperluas dan memperkuat kerja sama di berbagai bidang. Mitigasi dampak di Okinawa merupakan isu yang harus ditangani oleh pemerintah sepenuhnya. Jepang akan mencoba kemungkinan relokasi *Marine Corps Air Station* (MCAS) Futenma kemungkinan relokasi ke Henoko untuk menghilangkan bahaya yang dapat di timbulkan.

Pedoman baru tersebut menentukan hal-hal yang perlu ditekankan dalam kerja sama keamanan dan pertahanan. Tujuan dari Pedoman baru ini dipertahankan sesuai dengan Pedoman 1997. Koordinasi Aliansi yang Diperkuat, Kedua pemerintah akan membentuk Mekanisme

Koordinasi Aliansi yang berdiri sendiri, dan mengembangkan dan memperbarui rencana bilateral. Memastikan Perdamaian dan Keamanan Jepang. Dengan adanya pedoman baru ini JDSF hanya bisa membantu sekutu yang diserang jika Jepang berada dalam 3 kondisi ini:

1. Keberlangsungan hidup Negara Jepang di pertaruhkan
2. Semua pilihan non militer sudah tidak bisa di pakai
3. Penggunaan kekuatan yang terbatas untuk mencegah agres

Selain itu, JSDF dapat datang untuk menyelamatkan pasukan penjaga perdamaian PBB lainnya dan warga sipil Jepang dalam bahaya dan diizinkan menggunakan senjata mereka terlebih dahulu, tidak hanya untuk membela diri saja. Dengan pedoman ini menyajikan arahan untuk mencapai kerjasama yang baik, dari masa damai sampai kontinjensi, untuk memastikan keamanan Jepang. Dengan segala keterbatasan militer yang Jepang punya, adanya militer AS di pulau Jepang merupakan langkah yang tak bisa di hindari demi menjaga keamanan Negara Jepang sendiri dari kekuatan kekuatan yang di punyai Negara Negara besar lainnya seperti China dan Korea Utara yang mana mempunyai konflik perebutan pulau dengan Jepang.

Untuk melindungi dan mencapai kepentingan nasional Jepang, Jepang bermaksud untuk terus bekerja pada tiga pilar kebijakan luar negeri Jepang yaitu pertama adalah untuk memperkuat Aliansi Jepang-AS, kedua untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara tetangga, dan pilar yang terakhir adalah untuk memperkuat diplomasi ekonomi sebagai alat untuk menjalankan pertumbuhan ekonomi Jepang.

Pilar pertama menyebutkan bahwa Jepang akan memperkuat aliasnsinya dengan AS. Jepang-AS adalah jalur utama diplomasi Jepang. Jepang bekerja sama dengan AS yang mengambil kebijakan untuk menjadi penyeimbang di Kawasan Asia Pasifik, dan Jepang akan terus memperkuat Aliansi Jepang-AS di semua wilayah. Perdana Menteri Abe mengunjungi AS pada

bulan April 2015, Abe dan Obama mengkonfirmasi bahwa mereka akan terus memenuhi peran utama dalam memastikan perdamaian dan stabilitas kawasan dan dunia..

Di pilar kedua menyebutkan bahwa Jepang akan meningkatkan hubungan dengan negara-negara tetangga Dalam hal yang membuat lingkungan di sekitar Jepang stabil, meningkatkan hubungan kita dengan negara-negara tetangga merupakan dasar penting. Hubungan dengan China merupakan salah satu hubungan bilateral terpenting di Jepang. Jepang dan China berbagi tanggung jawab untuk perdamaian, stabilitas kawasan dan masyarakat internasional. Jepang akan terus melakukan dialog dan kerja sama di berbagai bidang dan berusaha untuk lebih mempromosikan hubungan yang saling menguntungkan berdasarkan kepentingan umum strategis. Sementara itu, mengingat situasi di Laut Cina Timur memburuk, Jepang merespons dengan tegas namun tenang saat membuat klaim yang harus dilakukan dalam menangani gangguan China di perairan teritorial Jepang di sekitar Kepulauan Senkaku dan pengembangan sumber daya sepihaknya di daerah yang dibatasi.

Pilar ketiga mengenai Jepang akan memperkuat diplomasi ekonomi sebagai alat untuk menjalankan perekonomian Jepang. Diplomasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang merupakan salah satu prioritas kebijakan Jepang. Bagi Jepang, sebuah negara maritim dengan sumber daya yang langka, sangat penting untuk mempertahankan dan mengembangkan tatanan ekonomi internasional yang terbuka dan stabil berdasarkan peraturan yang telah diterapkan. Untuk mendapatkan kembali Jepang yang kuat dan merevitalisasi ekonominya, Jepang memanfaatkan berbagai kerangka kerja internasional mengenai ekonomi, seperti *G7*, *Group of Twenty (G20)*, *World Trade Organization (WTO)*, *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dan *APEC*, untuk berkontribusi membentuk tatanan ekonomi internasional. Kesepakatan pada prinsipnya dicapai pada bulan Oktober 2015 mengenai Perjanjian *Trans-Pacific*

*Partnership (TPP)*, yang menciptakan zona ekonomi besar dan tunggal yang melibatkan populasi sekitar 800 juta dan mencakup hampir 40% PDB dunia. Itu ditandatangani pada bulan Februari 2016. Perjanjian TPP, yang menetapkan peraturan abad ke-21 dalam berbagai bidang, termasuk tidak hanya bea masuk barang, tetapi juga layanan, investasi, kekayaan intelektual dan perusahaan milik negara, diharapkan dapat memberikan standar baru untuk peraturan perdagangan dan investasi dunia.

Dari bab ini bisa di lihat bahwa Jepang berusaha mencapai segala kepentingan negaranya dengan melakukan *self preservation*. Yaitu usaha melindungi diri dari bendungan kekuatan China yang semakin lama semakin menunjukkan kemajuan ekonominya dan Korea Utara yang mempunyai militer yang semakin berkembang namun tidak secara transparan menjelaskan militer yang dipunyai. Segala keterbatasan militer yang dimiliki dan kecenderungan China dan Korea Utara mengharuskan Jepang untuk tetap membiarkan pangkalan militer AS di Jepang. Hal itu dapat melindungi identitas fisik Negara Jepang, Kebudayaan, dan teritorinya. Walaupun Jepang mempunyai tuntutan domestik yaitu tuntutan warga Okinawa yang menginginkan untuk mengeluarkan pangkalan militer AS keluar dari Okinawa, namun Jepang harus membuat keputusan untuk mengesampingkannya tuntutan tersebut dikarenakan Jepang tidak hanya harus mencapai kepentingan domestiknya namun juga harus membuat keputusan untuk kepentingan nasionalnya. Dengan militer Jepang yang terbatas itu menjadi hal yang mempengaruhi Pemerintah Jepang dalam memutuskan sebuah keputusan untuk negaranya. Dengan segala hal hal yang mempengaruhi Jepang dalam membuat keputusan maka Jepang tetap memutuskan untuk mempertahankan pangkalan militer AS di Okinawa.